

## BIBLIOGRAPHY

Armstrong, A., Francis, R. & Totikidis, V. 2004, 'Managing Community Governance: Determinants and inhibitors.' *ANZAM 18th Annual Conference of the Australian and New Zealand Academy of Management*, Dunedin, 8-11 December [http://www.business.otago.ac.nz/mgmt/ANZAM2004/CD/Authors\\_Alpha\\_Search.htm](http://www.business.otago.ac.nz/mgmt/ANZAM2004/CD/Authors_Alpha_Search.htm)

Asian Resources and Response Network (ADDRN). Terminologi Pengurangan Risiko Bencana. 2010.

Azhar Arsyad, Pokok-Pokok Manajemen, Pengetahuan Praktis Bagi Pimpinan dan Eksekutif (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 9.

Bowles, S. & Gintis, H. 2002, 'Social Capital and Community Governance', *Economic Journal*, vol. 112, no. 483, pp. 419-436.

Clarke, M. & Stewart, J. 1994, 'The Local Authority and the New Community Governance', *Regional Studies*, vol. 28, no. 2, pp. 201-209.

Clarke, M. & Stewart, J. 1998, *Community governance, community leadership and the new local government*, York Publishing Services, York.

Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Memahami Bencana (Jakarta: Departemen Komunikasi dan Informatika RI, 2008), hlm. 29.

Edwards, M. 2001, 'Participatory governance in the future: Roles of the government and community sectors', *Journal of Public Administration*, vol. 60, no. 3, pp. 78-88.

Febriani, P. (2013). *Pemberian motivasi kepala perpustakaan dalam meningkatkan prestasi kerja pustakawan di upt perpustakaan lain*. Surakarta: Ilmu Perpustakaan.

Freeman, C. & Littlewood, S. 1996, 'Local government and emerging models of participation in the Local Agenda 21 process.' *Journal of Environmental Planning & Management*, vol. 39, no. 1, pp. 65-79.

Gates, C. 1999, 'Community governance', *Futures*, vol. 31, no. 5, pp. 519-525

Gibson, et. al., terj. Djarkasih, Organisasi (Jakarta: Erlangga, 1994), hlm. 36.

HadiPurnomodan Ronny Sugiantoro, *ManajemenBencana* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2010), hlm. 9.

HadiPurnomodan Ronny Sugiantoro, *ManajemenBencana* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2010), hlm. 93.

Hamidi. 2005. *MetodePenelitianKualitatif: AplikasiPraktisPembuatan Proposal Dan LaporanPenelitian*. Malang: UMM PRESS

Halsall, J.P., 2013. Community governance – where did it all go wrong? *Journal of Administration and Governance* 8(1).

Halsall, J.P., I.G. Cook and P. Wankhade, 2013a. The big society debate: Is it a panacea for reducing the impact of welfare cuts in public health? : *World Journal of Social Sciences* Volume Number/Issue number not decided, in press.

InuKencanaSyafiie, *SistemAdministrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)* (Jakarta: BumiAksara, 2003), hlm. 117.

M. Fuad, et. al., *PengantarBisnis* (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 94.

MiftahThoha, *KepemimpinandalamManajemen* (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 1995), hlm. 8.

Totikidis, V., Armstrong, A. & Francis, R. 2004, 'Local Safety Committees and the Community Governance of Crime Prevention and Community Safety.' *Beyond Fragmented Government: Governance in the Public Sector Conference*, Victoria University, Melbourne,, 15-17 August 2004. Centre for International Corporate Governance Research (CICGR), Faculty of Business and Law, Victoria University

Wardhani, A. (2012). *Hubungan antara data sekunder dan data primer*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

## **BOOK**

Dalam Imam Gunawan. 2014. *METODE PENELITIAN KUALITATIF:*

*TeoridanPraktik*. Jakarta: BumiAksara. Hlm. 167

## **WEBSITE**

[www.bappenas.go.id/get-file-server/node/8842/](http://www.bappenas.go.id/get-file-server/node/8842/) accessed on 4 october 2017 at 18.40 am

<http://www.bnpb.go.id/website/asp/benc.asp?p=10> accessed on 4 October 2017 at 19.35 am

[www.google.com](http://www.google.com) accessed on 8 october 2017 at 16.00 pm

[www.yeu.or.id](http://www.yeu.or.id) accessed on 21 january 2018 at 09.00 pm

[www.mdmc.or.id](http://www.mdmc.or.id) accessed on 14 february 2018 at 21.00 am

## **THE REGULATION**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB)

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perda Provinsi DIY 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Penanggulangan Bencana

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penetapan Status Potensi Bencana

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana

Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 55 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;